

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merupakan Badan Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.¹

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.²

Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 1999 tentang penyenggaraan Statistik.

Dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik, BPS senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan serta kualitas pelayan data statistik.

¹ Arsip Tata Usaha (Document Badan Pusat Statistik 2014).

² *Ibid* hal. 54

Badan Pusat Statistik selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat kepuasan pengguna data melalui Survei Kebutuhan Data (SKD.)

Badan Pusat Statistik melakukan kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah antara bidang pertanian, pertambangan, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan, dan keagamaan. Selain hal – hal diatas Badan Pusat Statistik juga bertugas untuk melaksanakan koordinasi di lapangan, kegiatan statistik dari segenap instansi baik dipusat maupun didaerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan defenisi, klasifikasi dan ukuran – ukuran lainnya.

Humas diartikan sebagai salah satu kegiatan dari PR yang menangani hubungan antara lembaga dengan masyarakat. Humas adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan saran kepada pimpinan perusahaan serta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani baik kepentingan organisasi dan khalayaknya.³

Public relations sebuah kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Para praktisi public relations berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk memngembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga memngembangkan, melaksanakan, dan mengvaluasi program organisasi yang mempromisikan pertukaran pengaruh serta pemahaman di antara konstituen organisasi dan masyarakat.⁴

Salah satunya adalah kegiatan Public Relations. Jika sebelumnya kegiatan *Public Relations* mengandalkan pusran informasi pada media-media

³ Morissan. M. A. *Manajemen Public Relation* (Jakarta Medpress: 2010)hal.8

⁴ Dan Lattimore dkk. Toth. *Public Relations Profesi dan Praktik*. (Jakarta Salemba Humaika 2010) hal.4

konvensional seperti televisi dan surat kabar, maka ditengah gempuran inovasi internet yang terus berkembang pesat dan bervariasi, kegiatan Public Relations beralih kepada jalur digital atau awam, umum dilihat sebagai sebuah bentuk pengoperasian fungsi di dunia maya dalam praktik kerja public relations.

Media mempunyai berkontribusi pada spiral ketenangan, ketika memberikan suara, individu biasanya menyatakan bahwa mereka merasa tidak berdaya dihadapan media. Ada dua jenis pengalaman yang menekankan perasaan tidak berdaya ini. Pertama, kesulitan kesulitan mendapatkan publisitas untuk sebuah sudut pandang. Kedua, dikorbankan oleh media dalam apa yang Noelle-Neumann sebut dengan fungsi penghukum (pillory function) dari media. Dalam setiap hal, individu merasa tidak berdaya melawan media, menjadikan media sebuah bagian penting dari spirial ketenangan.⁵

Perencanaan merupakan sebuah proses menilai apa yang di miliki dan kemana akan melangkah, perencanaan menggerakkan kehumasan dari aktifitas reaktif menuju proses proaktif. Praktisi Humas, seperti halnya kebanyakan manajer, cenderung berorientasi pada tindakan. Perubahan yang terus terjadi didalam dan diluar organisasi menciptakan susunan masalah Humas yang tak pernah habis, perencanaan memungkinkan perkembangan usaha humas terpadu mendukung tujuan organisasi dengan cara positif.⁴

Di perlukan keberadaan fungsi humas secara maksimal agar data-data dan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dapat bermanfaat bagi publik . Perencanaan komunikasi yang dilakukan dapat membantu public dalam kebutuhan informasi dan peran media relations.

Asumsi penulis dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik dalam pengolahan data dan mempublikasikanya tentunya sering mengalami keluhan dan hambatan, Penulis ingin mengetahui bagaimana Badan Pusat Statistik pengolahan data dan mempublikasikanya dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

⁵ Stephen W. Littejohn & Karen A. Foss: *Teori Komunikasi* (Jakarta. Salemba Humanika 2009) hal.431

⁴M. Sobry Sutikno” Pengelolaan Pendidikan Tinjauan Umum dan Konsep Islami” Dalam <http://pdambandarmasih.com/forumpdam/index.php>,(22Nop 2011)

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Perencanaan Pengelola Data Informasi dan Publikasi Melalui Media Relation di Badan Pusat Statistik Propinsi Riau”, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah Berikut:

1. Perencanaan.

Perencanaan strategis public relations memberi organisasi sebuah proses public relations. Perencanaan strategis merupakan sebuah proses menilai apa yang anda miliki dan ke mana anda akan melangkah. Kematangan dan kedalaman berpikir sebelum pelaksanaan aktivitas public relations akan menentukan nilai fungsi public relations. Memahami bagaimana mengembangkan rencana publik manajemen puncak dalam public relations.⁶

2. Hubungan Masyarakat (Humas).

Dalam penelitian ini humas dipahami sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik, identifikasi kebijakan dan prosedur individu atau sebuah organisasi dengan kepentingan publik dan merencanakan dan melakukan program untuk merauh pengertian dan diterima oleh publik (2001:1). Terdapat dua perpektif teori dominan yang dapat digunakan untuk menelaah persoalan humas. Yang pertama adalah perpektif teori komunikasi dan yang kedua teori manajemen.

Sebagai sistem dalam manajemen, humas dengan konsep boundary role yang dikemukakan oleh Gruing dan Hunt menekankan bahwa humas harus melakukan fungsinya sebagai berikut:

- a. Humas harus menguasai hubungan organisasi ke lingkungannya.
- b. Humas harus dapat bekerja dengan batasan organisasi untuk membangun solusi inovatif atas problem organisasi.

⁶ *Ibid*, hal.128

- b. Humas harus berfikir strategis, harus bisa menunjukkan pengetahuan atas misi, tujuan dan strategi organisasi
- c. Humas harus dapat mengukur kelebihan suatu program komunikasi. (Manajemen publik relation)⁷

3. Pengelola Data Informasi

Pengelola data informasi, Data merupakan bentuk jamak dari datum yang dalam bahasa latin berarti pernyataan atau nilai dari suatu kenyataan. Pernyataan atau nilai ini berasal dari proses pengukuran atau pengamatan atas suatu variabel dan dipresentasikan dalam bentuk tunggal atau jamak dari angka (*numeric*), karakter (*text*), gambar (*image*) atau suara (*sound*).

Secara umum, pengertian data dapat didefinisikan sebagai nilai (*value*) yang merepresentasikan deskripsi dari suatu obyek atau peristiwa. Data dibentuk dari data mentah (*raw data*) yang berupa angka, karakter, gambar, atau bentuk lainnya. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang punya makna. Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.

4. Publikasi Data.

Publikasi berasal dari kata "*publicare*" yang berarti "untuk umum".

Pengertian publikasi lainnya :

- a. Segala informasi atau tindakan yang membawa seseorang individu menjadi dikenal publik.
- b. Kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan di media massa.
- c. Kegiatan perusahaan untuk melaporkan berita-berita mengenai bisnisnya.

⁷ Tommy Suprato, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi, Imedia pressindo Yogyakarta 2009*

- d. Segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan atau produknya kepada masyarakat melalui media massa.

Media mempublikasikan informasi yang disuplai organisasi dalam kolom seperti berita atau siaran berita, informasi tersebut kelihatannya membawa *sense of legitimacy* dimana organisasi tidak mungkin memperoleh bayaran dari iklan yang dibayarkan. Status ini memberikan berita dan informasi dari organisasi dengan apa yang disebut pengesahan pihak ketiga.⁸

5. Media relations

Public relation (PR) dan media massa tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, kedua profesi ini memiliki sinergi yang positif, keduanya saling membutuhkan. Dimana PR sebagai sumber berita bagi media, sedangkan media sarana bagi PR agar instansi atau perusahaan dan para komunikator lebih dikenal oleh publik, karena adanya berbagai pemberitaan media.⁹

Media memberikan metode yang relatif ekonomi dan efektif untuk berkomunikasi dengan publik yang luas dan menyebarkannya. Dalam hal ini, media berfungsi menjadi penjaga gerbang dan penyaringan tempat praktisi public relation menjangkau publik umum dan kelompok lainnya dengan kebutuhan masing-masing.¹⁰

6. Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Badan Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya,

⁸ Dan Lattimore.dkk. *Public Relations Profesi dan Praktik* (Jakarta Salemba Humaika 2010) hal.200

⁹ Elvinaro Ardianto. *Public Relations* (Bandung, Pustaka Bani Quraisy 2006) hal.91

¹⁰ *Ibid*, hal .200

secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diangkat adalah:

Bagaimana Perencanaan Humas Dalam Pengolahan Data Informasi dan Publikasikan melalui Media Relations di Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Riau?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui Perencanaan Humas Dalam Pengolahan Data Informasi dan Publikasikan melalui Media Relations di Badan Pusat Statistik Propinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Penelitian ini sebagai tahapan pembelajaran bagi peneulis dalam menuntut ilmu sebagai acuan mengambil gelar Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan khalayak.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Khalayak mengetahui Peran dan Tugas Badan Pusat Statistik Dalam Pengolahan Data dan Informasi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada pelaksanaan dalam mengambil keputusan.

¹¹ Arsip Tata Usaha (Document Badan Pusat Statistik 2014).

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan tersusun secara sistematis penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang dibagi dalam enam bab setiap bab terdiri dari sub bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I. Merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari; Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II. Pada bab II memuat penjelasan tentang Kajian Teori dan Kerangka Fikir, yaitu landasan teoritis yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam meneliti variabel penelitian. Dalam hal ini meliputi; Teori Komunikasi, Teori Perencanaan, Perencanaan Komunikasi, Teori Komunikasi Massa, Public Relation, Teori Media Baru, Media Relation.
- BAB III. Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, yang Meliputi; Waktu dan Tempat Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Definisi Operasional, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.
- BAB IV. Pada bab berikut ini menjelaskan Gambaran Umum tentang Perusahaan Badan Pusat Statistik, yaitu; Sejarah Singkat Perusahaan, Visi dan Misi Lembaga, Struktur Organisasi, Aktifitas Pegawai di Perusahaan.
- BAB V. Pada bab lima ini berisikan hasil penelitian tentang pembahasan masalah, yang menjelaskan.
- Bab VI. Bab ini merupakan bab Penutup, dimana pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan Saran dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.